

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin memegang peranan krusial dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Upaya ini dilakukan melalui program, termasuk pelayanan kontrasepsi bergerak, penyuluhan KB, dan pelaksanaan event-event pelayanan KB. Meskipun program KB bersifat opsional, pemerintah wajib menyediakan layanan ini kepada masyarakat. Target pengendalian penduduk meliputi remaja, usia subur melahirkan, dan pasangan yang akan menikah dalam waktu dekat. Data demografi dan koodinasi dengan pemangku kebijakan menjadi kunci dalam proses pengendalian ini. Pemerintah kota banjarmasin melalui DPPKBPM telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk, di antaranya Progaram Bangga Kencana yang mencakup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Sehubungan dengan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Faktor pendukung yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di antaranya faktor kelahiran, eduksi oleh DPPKBPM, dan kemitraan atau kerjasama.

2. Kendala yang Dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Terkait Pelaksanaan Program Keluarga Berencana ialah adanya mitos budaya dan aturan agama, kurangnya peran istri dan suami, ketidaktahuan manfaat dari kepesertaan KB, kekhawatiran akan efek samping dari alat dan obat kontrasepsi, dan kurang baiknya koordinasi dengan pihak lain.

3. Saran

1. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui DPPKBPM lebih masif lagi dalam melakukan mengatur laju pertumbuhan penduduk melalui program utamanya berupa program KB. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi secara langsung tatap muka atau melalui media informasi lainnya.
2. Masyarakat diharapkan mampu terbuka atas program KB yang telah diberikan oleh DPPKBPM agar optimalisasi persiapan dalam perencanaan kehidupan berkeluarga lebih teratur.
3. Mahasiswa atau peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam dalam hal program Keluarga Berencana menurut ulama banjar.